



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DZAKIYUL FIKRI, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. (HCUA) Dr. MIA AMIATI, S.H., M.H., CMA., CSSL.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bondowoso, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
JAWA TIMUR,

Prof. (HCUA) Dr. MIA AMIATI, S.H.,  
M.H., CMA., CSSL.

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BONDOWOSO,



DZAKIYUL FIKRI, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.594.116.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.748.101.000
Jumlah		Rp. 11.342.217.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bondowoso, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
JAWA TIMUR,

Prof. (HCUA) Dr. MIA AMIATI, S.H.,  
M.H., CMA., CSSL.

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BONDOWOSO,



DZAKIYUL FIKRI, S.H., M.H.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN PURNAMA, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

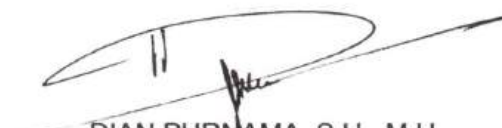
Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso  
  
Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 19701426 199603 1001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

  
DIAN PURNAMA, S.H., M.H.  
Jaksa Madya  
Nip. 198207262007031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	90%
		Persentase Perkara	Jumlah perkara tindak pidana	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}} \times 100$	
Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan}} \times 100$	90%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$	90%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$	90%	
Persentase Perkara		Jumlah perkara tindak pidana	90%	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	90%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan</p>	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan,	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>tahap penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p>	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Rp. 361.602.500,-
2.	Dst	
Jumlah		

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

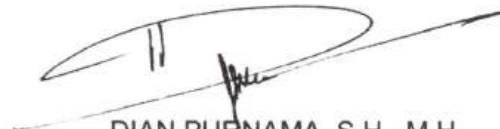
Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



Dzakwul Fikri, S.H., M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 19701126 199603 1001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus  
Kejaksaan Negeri Bondowoso



DIAN PURNAMA, S.H., M.H.  
Jaksa Madya  
Nip. 198207262007031001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Paulus Agung Widaryanto, S.H  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

Paulus Agung Widaryanto, S.H  
Jaksa Madya  
19671219 199603 1003

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 19701126 199603 1001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}} \times 100$	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van</i>	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
	Pidana Umum	<i>gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	(badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Rp. 821.183.000,-
	Jumlah	

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



Dzakki Fikri, S.H., M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 19701126 199603 1001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum  
Kejaksaan Negeri Bondowoso



Paulus Agung Widaryanto, S.H  
Jaksa Madya  
19671219 199603 1003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NALA ARJHUNTO, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso

  
Dzakiyul Fikri, S.H., M.H  
Jaksa Muda Pratama  
Nip. 197011261996031001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata dan TUN

  
NALA ARJHUNTO, S.H., M.H  
Jaksa Muda  
Nip 198610142009121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Jumlah laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri tepat waktu  ----- x 100	90%
		Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	1. Jumlah penerima pertimbangan hukum  ----- x 100  Jumlah target penerima pertimbangan hukum  2. Jumlah penerima Pertimbangan hukum	90%     %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	
		Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Gratis	Jumlah Penerima Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis----- x 100 Jumlah target penerima Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Rp. 75.400.000,-
3.	Dst	
	Jumlah	

#### D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



*[Signature]*

Praktisi Fisi, S.H., M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 197011261996031001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata dan TUN  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

*[Signature]*

NALA ARJHUNTO, S.H., M.H  
Jaksa Muda  
Nip 198610142009121001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADI HARSANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 197011261996031001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Intelijen  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

  
ADI HARSANTO, S.H., M.H.  
Jaksa Madya  
Nip. 197306101993031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu  ----- x 100  Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	90%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan	1. Jumlah penerima penerangan hukum  ----- x 100  Jumlah target penerima	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hukum	Hukum	<p>penerangan hukum</p> <p>2. Jumlah penerima penyuluhan hukum</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah target penerima penyuluhan hukum</p>	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	<p>Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>-----x 100</p> <p>Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan</p>	90%
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		<p>Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>-----x 100</p> <p>Surat perintah PAKEM yang diterbitkan</p>	90%	
Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen		<p>Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan</p> <p>-----x 100</p> <p>Target Kegiatan Posko Intelijen</p>	90%	
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset		<p>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan</p> <p>-----x 100</p> <p>Target Kegiatan Pelacakan</p>	90%	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Aset	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan  -----x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Penyelidikan / Pemananan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Rp. 179.384.000,-
2.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di daerah	
	Jumlah	

#### D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Pihak Kedua,



Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Intelijen  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

ADI HARSANTO, S.H., M.H.  
Jaksa Madya  
Nip. 197306101993031002



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Condro Maharanto, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



Dzakiyul Fikri, S.H., M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 197011261996031001

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Pembinaan  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

Condro Maharanto, S.H., M.H  
Jaksa Madya  
Nip. 198304272007031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Realisasi anggaran ----- x 100 Jumlah pagu anggaran	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksanaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	$\frac{\text{Kepatuhan pelaporan pada CMS}}{\text{Jumlah Perkaran Riil}} \times 100$	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Kejaksanaan Negeri	Rp.9.760.967.000,-
2.		
3.	Dst	
Jumlah		

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksanaan Negeri

Bondowoso



Dzakir Fikri, S.H., M.H.  
 Jaksa Utama Pratama  
 Nip. 19701126 199603 1001

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Pembinaan

Kejaksanaan Negeri Bondowoso

Condoro Maharanto, S.H., M.H.

Jaksa Madya

Nip. 19830427 200703 1001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arga Maramba Pandin Purba S, S.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan  
Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso  
  
Dzakiyul Fikri, S.H.,M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 19703126 199603 1001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang  
Rampasan  
  
Arga Maramba Pandin Purba S, S.H.  
Jaksa Muda  
Nip. 198405152008121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kejaksaan Negeri Bondowoso	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan tepat waktu  ----- x 100	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	Rp. 142.100.000,-
3.	Dst	
	Jumlah	

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			

Bondowoso, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,


Kepala Kejaksaan Negeri  
Bondowoso



Dzakiyah Fikri, S.H.,M.H  
Jaksa Utama Pratama  
Nip. 197 01 126199603 1001

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang  
Rampasan



Arga Maramba Pandin Purba S, S.H.  
Jaksa Muda  
Nip. 198405152008121001